

# Kebijakan Program MBKM dan Implementasinya dalam Kegiatan Akademik Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Yuli Priyana<sup>\*</sup>, Jumadi, Danardono, Vidya N. Fikriyah, M Iqbal Taufiqurrahman Sunariya, Aditya Saputra, Hamim Zaky Hadibasyir

Fakultas Geografi UMS, Kampus 1 UMS Gedung I Lt. 2, Jl. Ahmad Yani, Pabelan, Kartasura, Surakarta 57162, Jawa Tengah, Indonesia

<sup>\*</sup> email: yuli.priyana@ums.ac.id

**Abstract.** *Society 5.0 demands that people live by utilizing the functions of digital technology in their lives and be able to deal with dynamics in various aspects of life. Universities have an important role in preparing a generation to be able to face various possibilities in the future. The MBKM program is one of the means to prepare a generation that has cross-disciplinary capabilities to face the challenges of the times. Faculty of Geography Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) for the past semester has determined and implemented policies for implementing MBKM in the Geography Faculty of UMS. This article discusses the MBKM program policy and its implementation at the Faculty of Geography UMS.*

**Keywords:** *Society 5.0; MBKM Policy; MBKM Program.*

**Abstrak.** *Society 5.0 menuntut masyarakat dapat hidup dengan memanfaatkan fungsi teknologi digital dalam kehidupannya serta mampu menghadapi dinamika dalam berbagai bidang. Perguruan tinggi memiliki peran yang penting dalam rangka menyiapkan generasi yang mampu menghadapi berbagai kemungkinan di masa yang akan datang. Program MBKM merupakan salah satu sarana menyiapkan generasi yang memiliki kemampuan lintas bidang untuk menghadapi tantangan jaman tersebut. Fakultas Geografi selama satu semester terakhir telah menetapkan dan menerapkan kebijakan pelaksanaan MBKM di Fakultas Geografi UMS. Artikel ini membahas tentang kebijakan program MBKM dan implementasinya di Fakultas Geografi UMS.*

**Kata kunci:** *Society 5.0; kebijakan MBKM; proram MBKM.*

## PENDAHULUAN

Transformasi teknologi digital saat ini melanda di semua wilayah yang ada didunia, kondisi ini biasa disebut dengan *Industry 4.0*. *Industry 4.0* memberikan dampak terhadap perkembangan teknologi, *Internet of Things (IoT)* dan *Artificial Intelligence (AI)*, yang kemudian berakibat pada perubahan dalam setiap sendi kehidupan (Suherman, et al, 2020). Melalui perkembangan teknologi tersebut, masyarakat akan lebih mudah dalam pemecahan masalah-masalah, interaksi antar masyarakat dan dapat menggantikan kerja fisik manusia (Potočan, et al, 2020). Transformasi teknologi digital saat ini mengharuskan masyarakat untuk dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi yang terjadi.

Adaptasi masyarakat dalam menggunakan teknologi dalam kehidupannya memunculkan konsep *society 5.0*. Konsep *Society 5.0* dikeluarkan oleh pemerintah jepang pada tahun 2016 dengan tujuan utama membangun masyarakat yang *human-centric* dengan pembangunan ekonomi dan penyelesaian masalah didalam masyarakat teratasi dan setiap orang dapat menikmati kehidupan yang berkualitas (Fukuyama, 2018). Sehingga, *Society 5.0* menekankan kepada fungsi dari teknologi informasi dan digital memiliki peran dan menjadi bagian dari kehidupan manusia (Ellitan, 2020).

Tantangan dalam *Society 5.0* saat ini adalah bagaimana masyarakat dapat segera beradaptasi dan memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital dalam

---

mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat (Fukuyama, 2018). Tantangan tersebut kemudian dijawab oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan membuat program Merdeka Belajar-Kampus Mengajar (MBKM). Program MBKM yang diluncurkan tahun 2020 bertujuan untuk menghasilkan lulusan berkepribadian dan unggul dengan memiliki *soft skill* dan *hard skill* yang baik, sehingga bisa menjawab tantangan dan sesuai dengan kebutuhan dalam masyarakat (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020).

Program MBKM menurut Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dibuat berdasarkan pada filsafat pendidikan K.H. Dewantara yang menekankan pendidikan didasari oleh kemerdekaan dan kemandirian (Fuadi, T.M. & Aswita, D., 2021). Program MBKM ini memungkinkan untuk mahasiswa dapat mengembangkan dirinya dengan mendapatkan pengetahuan dari program studi lain, industri dan didalam masyarakat. Tantangan dalam program MBKM ini adalah bagaimana program ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Salah satu upaya agar implementasi program MBKM dapat berhasil adalah dengan membuat proses pembelajaran di Perguruan Tinggi menjadi lebih otonom dan fleksibel dengan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi serta pasar (Yusuf, M., & Arfiansyah, W., 2020). Kondisi tersebut mengharuskan fakultas membuat kebijakan turunan untuk sebagai dasar implementasi program MBKM dalam lingkup program studi untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan perkembangan zaman sehingga menghasilkan alumni yang siap bekerja dan mampu beradaptasi dengan setiap permasalahan yang akan dihadapi (Nanggala, A., & Suryadi, K., 2020). Berdasarkan kondisi diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan dan contoh bentuk implementasi program MBKM di Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) telah dicanangkan sejak awal tahun 2020 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dimana secara umum kebijakan ini berisi tentang pemberian hak kepada mahasiswa untuk belajar, berkegiatan, dan mengembangkan ilmu di luar program studi. Inovasi kebijakan pendidikan ini didesain di level nasional dengan empat rincian untuk lingkup perguruan tinggi dalam rangka memberikan kesempatan belajar sesuai dengan keinginan (Sopiansyah dkk., 2022). Rincian tersebut secara paket memuat tentang sistem akreditasi, pemberian hak belajar di luar prodi selama tiga semester, kemudahan pembukaan prodi baru, serta fasilitas kemudahan menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum.

Konsep MBKM dibentuk dalam rangka mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di lingkungan kerja saat era digital sekarang ini (Puspitasari & Nugroho, 2021). Kebijakan MBKM memfasilitasi mahasiswa mahasiswa untuk belajar sebanyak 20 SKS di luar prodi dalam perguruan tinggi yang sama dan 40 SKS di luar prodi perguruan tinggi lain. Berdasarkan buku panduan MBKM (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020), kegiatan yang tercakup di MBKM ini adalah (1) pertukaran pelajar, (2) magang/ praktik kerja, (3) asistensi mengajar, (4) penelitian, (5) proyek kemanusiaan, (6) kegiatan wirausaha, (7) studi/proyek independent, dan (8) KKN tematik. Dalam implementasinya di tingkat perguruan tinggi, terdapat delapan jenis Indikator Kinerja Utama yang menjadi ukuran capaian implementasi MBKM. Pertama adalah indikator apakah lulusan mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Indikator kedua yakni pengalaman mahasiswa di luar universitas, seperti magang dan wirausaha. Ketiga dan keempat adalah kegiatan dosen di luar kampus dan ketersediaan praktisi yang mengajar. Selanjutnya, capaian yang diukur yakni hasil pekerjaan dosen yang dirasakan masyarakat dan jumlah kerjasama dengan mitra global. Ukuran terakhir adalah kolaborasi dan partisipasi mahasiswa di kelas serta jumlah prodi yang memiliki kualifikasi dan diakui internasional.

Kebijakan MBKM ini juga kemudian telah diadaptasi di tingkat universitas. Di Universitas Muhammadiyah Surakarta khususnya, aturan implementasi dan integrasi kegiatan MBKM pada kurikulum tercantum pada buku panduan pengembangan kurikulum yang diluncurkan di tahun 2021 (UMS, 2021a). Sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut, UMS juga kerap mengadakan sosialisasi pelaksanaan MBKM kepada dosen dan mahasiswa (UMS, 2021b), sehingga partisipasi masif tersebut kemudian menghasilkan penghargaan anugerah utama MBKM (UMS, 2021c).

Bentuk kegiatan implementasi MBKM di kurikulum UMS utamanya mengacu pada pendidikan berbasis Outcome Base Education (OBE) dan Kompetensi Holistik Integratif (KHI). Pendidikan bersifat OBE dimaksudkan sebagai pendidikan yang menekankan pada hasil dan tercapainya tujuan yang telah dibebankan oleh suatu mata kuliah (Noor dkk., 2021), melalui proses pembelajaran secara inovatif, interaktif, dan efektif (Efendi, 2020). Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang berbasis input atau *teacher-centered learning*, pendekatan pendidikan secara OBE ini merupakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (mahasiswa) sehingga dapat tercapai kemampuan dalam aspek (1) pengetahuan, (2) sikap, serta (3) keterampilan (Noor dkk., 2021). Penerapan pendidikan dengan model OBE di tingkat perguruan tinggi dicontohkan seperti adanya publikasi ilmiah mahasiswa hasil penelitian dan kuliah (Salamah & Darmalaksana, 2021), serta pembaharuan kurikulum pendidikan yang menyesuaikan dengan kebutuhan lulusan ketika bekerja (Suhadianto dkk., 2019). Di lingkup UMS sendiri, secara implementatif pendidikan berbasis OBE dilakukan dalam konteks KHI, yakni pembelajaran secara menyeluruh dan terpadu yang mencakup semua aspek, seperti pembentukan karakter, nilai, dan intelektual untuk optimalisasi kemampuan mahasiswa (Ngiu dkk., 2021).

## METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan menjelaskan tahapan pengembangan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar serta penerapan MBKM. Pengembangan kebijakan penerapan program MBKM meliputi rancangan kebijakan MBKM di perguruan tinggi, rancangan standar operasional baku pelaksanaan MBKM, implementasi dari program kegiatan meliputi Rancangan program kegiatan MBKM, penyusunan panduan pelaksanaan kegiatan MBKM, dan konversi alih kredit/Pengakuan SKS. Kemudian, dilakukan deskripsi hasil pelaksanaan program MBKM yang dilakukan oleh prodi di Fakultas Geografi UMS berdasarkan data kegiatan MBKM tahun 2021.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Mekanisme Pembuatan Kebijakan Integrasi Program MBKM dalam Kegiatan Akademik

Sejak dicetuskannya program MBKM pada tahun 2020, Fakultas Geografi merespon dengan melakukan beberapa kegiatan guna mengintegrasikan program MBKM dalam kegiatan akademik di lingkup fakultas. Salah satu bentuknya dengan menyusun kebijakan sebagai dasar pelaksanaan integrasi program MBKM dalam kegiatan akademik di lingkup prodi. Penyusunan kebijakan fakultas merupakan bentuk kebijakan turunan dari tingkat universitas dimana program MBKM harus terintegrasi dalam kurikulum. Kebijakan di tingkat universitas dikeluarkan melalui surat edaran Rektor UMS terkait integrasi pengembangan kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE), MBKM, Talenta Inovasi, dan Kompetensi Holistik.

Penyusunan kebijakan dilaksanakan secara komprehensif dengan terlebih dahulu melakukan kegiatan workshop untuk melakukan benchmarking terkait kebijakan pelaksanaan program MBKM di Fakultas Geografi UGM. Kegiatan benchmarking ini dilaksanakan dengan

mengundang Dekan Fakultas Geografi UGM yaitu Dr. Andri Kurniawan, M.Si yang dilaksanakan secara daring dengan menggunakan platform Zoom. Hasil dari kegiatan ini tidak hanya digunakan sebagai wahana bertukar pikiran dalam pembuatan kebijakan dan teknis pelaksanaan MBKM di tingkat fakultas dan prodi, serta sebagai bentuk sosialisasi program MBKM kepada seluruh sivitas akademika di lingkup Fakultas Geografi UMS. Kesemua rangkaian kegiatan diikuti oleh seluruh 14 dosen, 7 tenaga kependidikan, dan perwakilan mahasiswa. Adapun foto kegiatan workshop benchmarking integrasi program MBKM dalam kegiatan akademik fakultas dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Foto Kegiatan Workshop Benchmarking Integrasi MBKM dalam Kegiatan Akademik

Hasil kegiatan workshop kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pelaksanaan program MBKM di tingkat Fakultas Geografi UMS. Kebijakan integrasi program MBKM di tingkat fakultas kemudian dibentuk dalam Surat Edaran Dekan Fakultas Geografi UMS No. 746/A.5-II/FGEO/IX/2021 mengenai mekanisme pelaksanaan program MBKM mulai awal pendaftaran sampai evaluasi akhir pasca pelaksanaan program MBKM serta mekanisme konversi nilai ke SKS matakuliah. Selain itu dibuat juga Surat Edaran Dekan Fakultas Geografi UMS No. 671/A.1-II/FGEO/IX/2021 yang mengatur tentang mekanisme konversi kegiatan MBKM ke matakuliah skripsi. Kedua surat edaran tersebut menerangkan bahwa terdapat lima kegiatan MBKM yang dapat diakui dan dikonversi ke dalam mata kuliah di lingkup Fakultas Geografi UMS yaitu pertukaran pelajar, magang/ praktik kerja, penelitian/ riset, proyek di desa, dan proyek kemanusiaan.

Kedua kebijakan tersebut kemudian di sosialisasikan secara masif kepada mahasiswa di lingkup Fakultas Geografi UMS melalui berbagai macam platform baik sinkron dengan menggunakan Zoom dan asinkron dengan menggunakan website, instagram, dan whatsapp. Adapun foto kegiatan sosialisasi kepada mahasiswa tersaji pada Gambar 2.



Gambar 2. Sosialisasi Kebijakan Implementasi Kegiatan MBKM dalam Kegiatan di Fakultas Geografi

#### b. Kebijakan Integrasi Program MBKM dalam Kegiatan Akademik

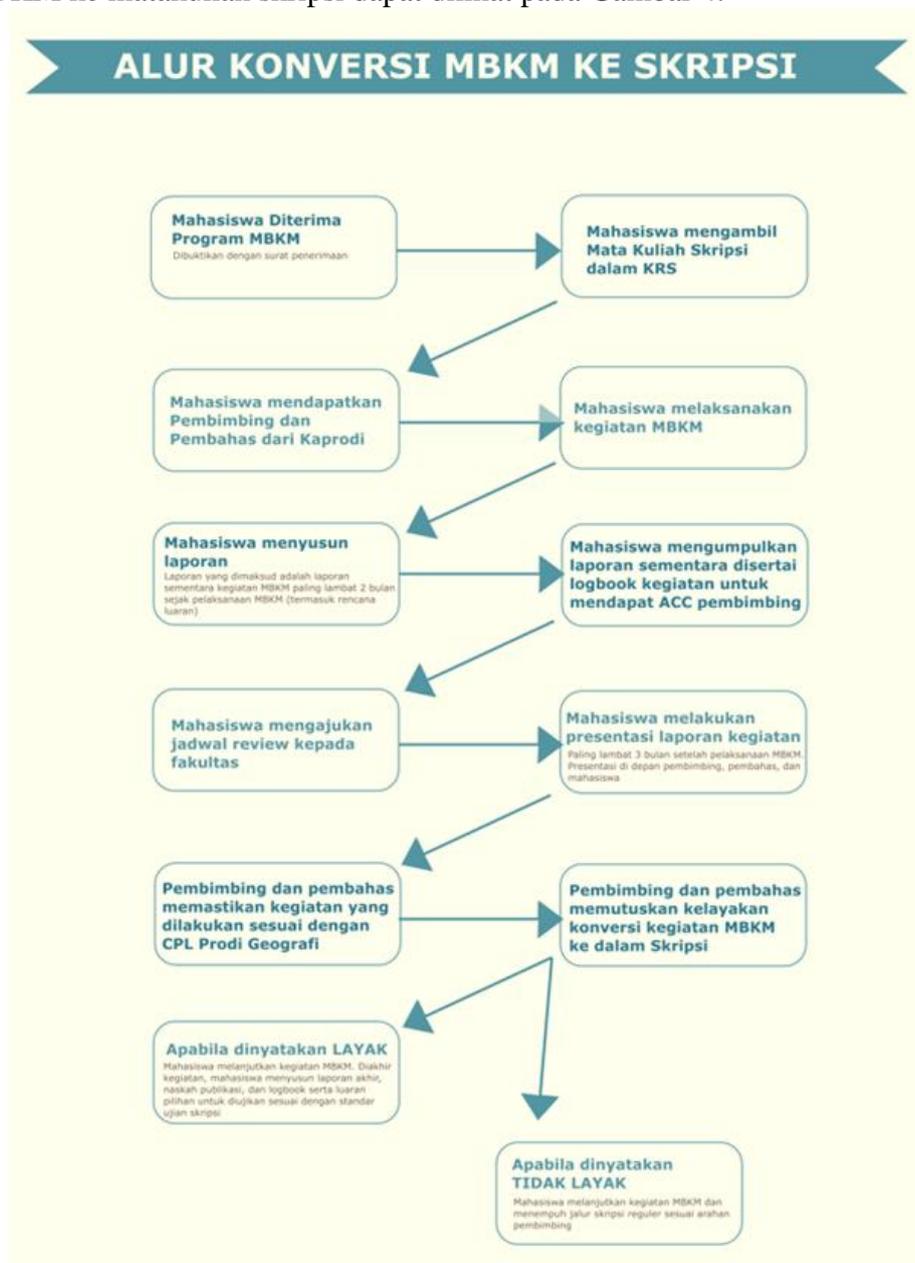
Isi dari Surat Edaran Dekan Fakultas Geografi UMS No. 746/A.5-II/FGEO/IX/2021 mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan konversi kegiatan MBKM ke dalam sks matakuliah. Secara garis besar mekanisme konversi dimulai dengan mahasiswa melakukan pendaftaran ke prodi untuk melaksanakan MBKM. Kemudian Kaprodi akan melakukan review kelayakan pelaksanaan MBKM untuk dikonversi dengan memperhatikan jenis MBKM dan tugas mahasiswa ketika pelaksanaan MBKM. Jika kegiatan MBKM sudah dinilai layak maka mahasiswa akan diberikan surat keterangan konversi dari fakultas yang nantinya dijadikan dasar dalam konversi nilai sks matakuliah. Adapun mekanisme konversi kegiatan MBKM ke sks matakuliah dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Mekanisme Pelaksanaan Konversi Kegiatan MBKM ke SKS Matakuliah

Sementara Surat Edaran Dekan Fakultas Geografi UMS No. 671/A.1-II/FGEO/IX/2021 mengatur tentang mekanisme konversi kegiatan MBKM ke dalam matakuliah skripsi. Secara umum, mekanisme konversi kegiatan MBKM ke skripsi matakuliah sama dengan mekanisme konversi kegiatan MBKM ke sks matakuliah, hanya saja perbedaannya kegiatan MBKM yang dapat dikonversi menjadi matakuliah skripsi, mahasiswa diharuskan menjadikan laporan magang untuk dipublikasikan ke dalam bentuk artikel ilmiah. Adapun mekanisme konversi

kegiatan MBKM ke matakuliah skripsi dapat dilihat pada Gambar 4.



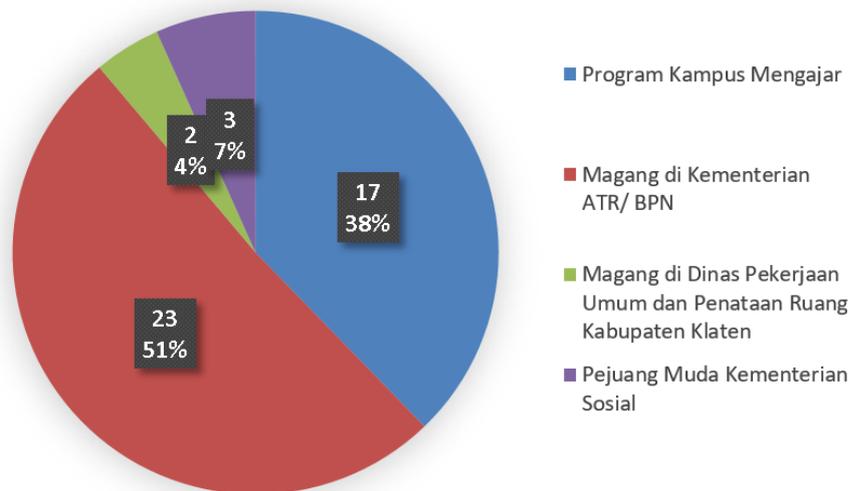
Gambar 4. Mekanisme Pelaksanaan Konversi Kegiatan MBKM ke Matakuliah Skripsi

### c. Implementasi Kebijakan Integrasi Program MBKM dalam Kegiatan Akademis

Keluarnya kebijakan integrasi program MBKM dalam kegiatan akademis dalam lingkup fakultas langsung diterapkan oleh prodi di bawah Fakultas Geografi. Bentuk implementasi kebijakan di lingkup prodi yaitu dengan dilaksanakannya peninjauan kurikulum prodi untuk mengintegrasikan program MBKM ke dalam kurikulum prodi. Munculnya kebijakan MBKM ini sejalan dengan kegiatan peninjauan kurikulum mayor lima tahunan Prodi Geografi yang juga dilaksanakan pada tahun 2021. Oleh karena itu, peninjauan dilakukan tidak hanya dilaksanakan untuk menyesuaikan kurikulum prodi dengan perkembangan keilmuan dan tuntutan pasar tetapi juga didasarkan pada integrasi kegiatan MBKM dalam kurikulum.

Adanya kebijakan implementasi MBKM ini dapat mewadahi pelaksanaan konversi kegiatan MBKM ke dalam matakuliah, dimana animo mahasiswa dalam mengikuti program MBKM sangat tinggi selama rentang tahun 2021. Jumlah mahasiswa yang tercatat mengikuti program

MBKM sebanyak 46 orang. Jenis kegiatan MBKM yang diikuti oleh mahasiswa inipun beragam yaitu magang, proyek di desa, dan mengajar di sekolah. Adapun rincian mahasiswa yang mengikuti kegiatan magang sebanyak 25 mahasiswa di Kementerian ATR/ BPN dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten, kegiatan mengajar di sekolah melalui program Kampus Mengajar sebanyak 17 mahasiswa, dan sisanya berupa proyek di desa melalui program Pejuang Muda Kemensos sebanyak 3 mahasiswa. Adapun rincian jumlah kegiatan MBKM yang diikuti oleh mahasiswa di Fakultas Geografi selama tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 5. Jumlah Peserta Kegiatan MBKM di Fakultas Geografi UMS Tahun 2021

Kebijakan yang dikeluarkan oleh fakultas sudah terlaksana dengan baik. Berdasarkan data yang dihimpun dari Prodi Geografi, 46 mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM kesemuanya telah berhasil dikonversi menjadi SKS matakuliah, bahkan terdapat 1 mahasiswa yang berhasil terkonversi menjadi skripsi yaitu Ratantra Rasjid Agitama Luis dengan judul “Analisis Dampak Perubahan Penggunaan dan Status Lahan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk di Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen”. Skripsi tersebut ditulis dengan menggunakan data hasil program magang di Kementerian ATR/ BPN di Kabupaten Sragen.

Konversi matakuliah ditentukan berdasarkan relevansi kegiatan MBKM dengan capaian pembelajaran matakuliah yang akan dikonversi sehingga tiap jenis kegiatan akan memiliki matakuliah konversi yang berbeda. Pada kasus di Prodi Geografi, pada program magang di Kementerian ATR/BPN dikonversi menjadi 15 sks bagi yang menjalankan magang selama 6 bulan dan 8 sks bagi yang menjalankan magang 3 bulan. Adapun matakuliah yang terkonversi yaitu Ketrampilan Berkehidupan dan Web SIG (2 SKS), Manajemen Proyek Pembangunan (2 SKS), Evaluasi Sumberdaya Alam (2 SKS), Perencanaan Wilayah (2 SKS), Analisis Kota dan Daerah (3 SKS), Analisis dan Interpretasi Peta (2 SKS), dan Manajemen Produksi Peta (2 SKS). Hal ini disesuaikan dengan tugas ketika melakukan magang yaitu membantu dalam penyusunan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Pada program kampus mengajar yang dilaksanakan selama 6 bulan berhasil dikonversi menjadi 10 sks matakuliah yang terdiri dari matakuliah Ketrampilan Berkehidupan dan Web SIG (2 SKS), Perencanaan dan Pengembangan SDM (2 SKS), Geografi Pariwisata (2 SKS), Geografi Industri (2 SKS), dan Manajemen Produksi Peta (2 SKS). Hal ini karena tugas dalam program Kampus Mengajar yaitu mengajar pada sekolah-sekolah yang masuk dalam kriteria 3T (terluar, tertinggal, dan terpencil).

## SIMPULAN

Secara umum, program MBKM memberikan dampak yang positif terhadap proses

pembelajaran di program studi. Namun, dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Program studi mempersiapkan kurikulum yang mengakomodir pelaksanaan MBKM dengan menyediakan matakuliah yang adaptif dengan MBKM, serta sistem monitoring dan konversi mata kuliah kegiatan MBKM. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih masif kepada seluruh civitas akademika.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Setditjen Dikti Ristek yang telah memberi pembiayaan kegiatan riset ini melalui Bantuan Pendanaan Program Penelitian Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian dan Purwarupa PTS Kontrak Nomor: 404/PPK/Kerma/PKS/2021.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka, 1st ed. Jakarta.
- Efendi, R., 2020. IMPLEMENTASI AUTHENTIC ASESSMENT PADA PENDIDIKAN VOKASI TEKNIK INFORMATIKA. *Dharmas Educ. J.* 1, 232–240.
- Ellitan, Lena. 2020. Competing in the Era of Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0. *Maksipreneur 10 (1): 1–12.*
- Fuadi, T.M. & Aswita, D. (2021). *Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM): Bagaimana Penerapan Dan Kedala Yang Dihadapi Oleh Perguruan Tinggi Swasta Di Aceh.* *Jurnal Dedikasi Pendidikan*, 5(2), 603–614.
- Fukuyama, Mayumi. 2018. Society 5.0: Aiming for a New Human-Centered Society. *Japan Spotlight 27 (August): 47–50.* Yusuf, M., & Arfiansyah, W. (2021). Konsep “Merdeka Belajar” dalam Pandangan Filsafat Konstruktivisme. *Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 7(2), 120-133.
- Nanggala, A., & Suryadi, K. (2020). Analisis Konsep Kampus Merdeka dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(2), 10-23.
- Ngiu, Z., Djafri, N., Arwildayanto, A., 2021. Strategi Guru dalam Pembelajaran Holistik pada Pendidikan Anak Usia Dini. *J. Obs. J. Pendidik. Anak Usia Dini* 6, 1429–1438. <https://doi.org/10.31004/OBSESI.V6I3.1798>
- Noor, A.F.M., Shukor, K.A., Saharudin, N.A., 2021. Pencapaian Tujuan Pendidikan Berbasis Hasil (OBE) Dan Strategi Pembelajaran Mandiri Pendidikan Islam: Studi Pilot. *al-fikrah J. Manaj. Pendidik.* 9, 65–82.
- Potočan, Vojko, Matjaž Mulej, and Zlatko Nedelko. 2020. Society 5.0: Balancing of Industry 4.0, Economic Advancement and Social Problems. *Kybernetes Vol. 50 No. 3, 2021 pp. 794-811.* <https://doi.org/10.1108/K-12-2019-0858>.
- Puspitasari, R., Nugroho, R., 2021. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA FISIP UPN VETERAN JAWA TIMUR. *Din. Gov. J. Ilmu Adm. Negara* 11. <https://doi.org/10.33005/JDG.V11I2.2539>
- Salamah, N.S.S., Darmalaksana, W., 2021. Peningkatan Penulisan Artikel Mahasiswa bagi Akselerasi Publikasi Ilmiah Pendidikan Tinggi. *Edukasi* 1, 116–126.
- Sopiansyah, D., Masrurroh, S., Zaqiah, Q.Y., Erihadiana, M., 2022. Konsep dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). *Reslaj Relig. Educ. Soc. Laa Roiba J.* 4, 34–41. <https://doi.org/10.47467/RESLAJ.V4I1.458>
- Suhadianto, Domino, P., Eva, N., 2019. Implementasi Evaluasi Program Berbasis Outcome di Perguruan Tinggi, in: *Pengembangan Profesionalisme Dosen Dan Guru Indonesia.* pp. 766–773.

- Suherman, Musnaini, Hadion Wijoyo, Irjus Indrawan. 2020. *Industry 4.0 vs Society 5.0*. Banyumas: CV. Pena Persada.
- UMS, 2021a. PANDUAN PENGEMBANGAN KURIKULUM, 1st ed. Surakarta.
- UMS, 2021b. UMS Kembali adakan Sosialisasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ke Dua – Berita UMS [WWW Document]. URL <https://news.ums.ac.id/id/07/2021/ums-kembali-adakan-sosialisasi-merdeka-belajar-kampus-merdeka-mbkm-ke-dua/> (accessed 12.23.21).
- UMS, 2021c. UMS Pemenang Anugrah MBKM KEMDIKBUD RISTEKDIKTI – Berita UMS [WWW Document]. URL <https://news.ums.ac.id/id/08/2021/ums-pemenang-anugrah-mbkm-kemdikbudristekdikti/> (accessed 12.23.21).
- Yusuf, M., & Arfiansyah, W. (2021). Konsep “Merdeka Belajar” dalam Pandangan Filsafat Konstruktivisme. *Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 7(2), 120-133.